

BAB I

PENDAHULUAN

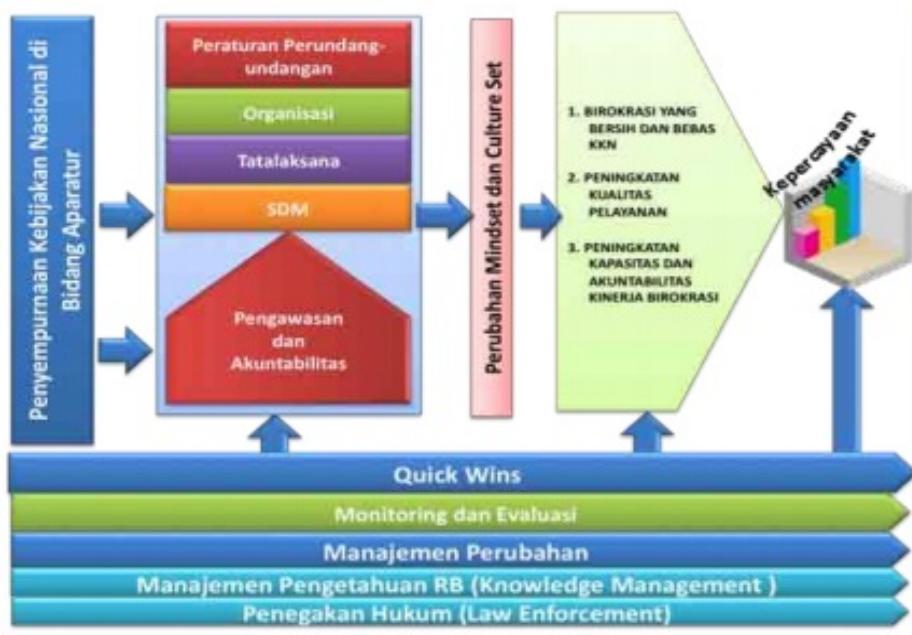
A. GAMBARAN UMUM

Penguatan kelembagaan adalah salah satu kunci sukses keberhasilan pencapaian program pembangunan Kebudayaan, sehingga koordinasi antara Sekretariat Direktorat Jenderal dengan unit-unit kerja lainnya dan keterpaduan antar kegiatan dalam pencapaian program pembangunan kebudayaan dapat diwujudkan. Dalam implementasinya, untuk menunjang penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien, akan diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program baik yang bersifat intra-sektoral dan inter-sektoral, dan juga diperlukan kebijakan-kebijakan yang saling melengkapi antar unit kerja dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Isu strategis penguatan kelembagaan yang perlu menjadi perhatian dalam kerangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di Direktorat Jenderal Kebudayaan di antaranya adalah implementasi reformasi birokrasi dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* telah digambarkan pola pikir pencapaian reformasi birokrasi. Gambar pola pikir tersebut menjelaskan bahwa implementasi dari program-program reformasi birokrasi baik pada tingkatan makro maupun mikro pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diyakini akan mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrat yang mencerminkan integritas dan kinerja yang semakin tinggi.

Gambar berikut adalah Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi pada *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* yang dimaksud di atas.



Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi

Selain sebagai bagian dari pola pikir pencapaian visi, dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga ditegaskan bahwa perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) menjadi salah satu dari sasaran 8 (delapan) area perubahan. Tabel di bawah ini menjelaskan area perubahan dan hasil yang diharapkan.

Area	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa perubahan pada pola pikir dan budaya kerja aparatur diharapkan akan menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Untuk itu diperlukan sosok aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi nilai-nilai dan menciptakan etos kerja yang lebih bertanggungjawab. Implementasi Reformasi Birokrasi sesungguhnya mendorong terjadinya perubahan baik dari segi internal maupun eksternal dalam upaya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dalam kerangka sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan system pemerintah yang bersih (*clean government*) untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi, pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pembangunan di bidang kebudayaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sedangkan fungsinya meliputi : (i) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; (ii) Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; (iii) Pengelolaan data dan informasi kebudayaan; (iv) Koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan; (v) Pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan; (vi) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; (vii) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; (viii) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; (ix) Koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan

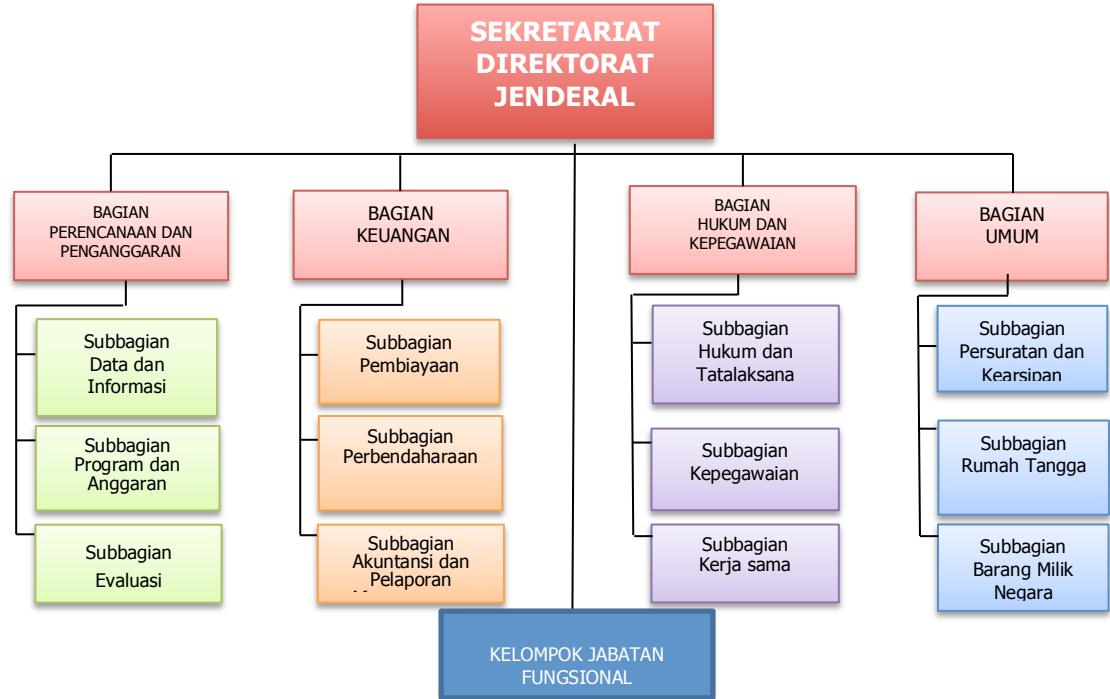
masyarakat di bidang kebudayaan; (x) Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan (xi) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari: Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Kepegawaian, serta Bagian Umum.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tersebut secara khusus Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan sistem pemerintah yang bersih (*clean government*) melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan inovatif melalui “Peningkatan Koordinasi dan Dukungan Manajemen di Bidang Kebudayaan”.

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagaimana dalam bagan berikut ini:



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Sebagai pelaksanaan Renstra tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyusun Renstra 2010-2014 yang mengacu, mendukung, dan melengkapi Renstra Kemendikbud pada periode tahun yang sama.

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan 2010-2014 memuat visi dan misi pembangunan kebudayaan yang sejalan dan mendukung visi dan misi Kemendikbud. Renstra ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program-program prioritas dari bidang kebudayaan. Keseluruhan strategi, arah kebijakan, dan program tersebut dalam rangka merespon kondisi umum internal dan eksternal, permasalahan, dan tantangan yang ada. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dalam rangka pembaharuan pendidikan dan kebudayaan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam kerangka pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi bidang kebudayaan tersebut, dan juga sebagai bagian pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan maka disusunlah Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang akan menjadi dasar pijak dan arahan pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam rangka pembangunan bidang kebudayaan di tahun 2010 – 2014.

1. Visi dan Misi

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah:

**"TERSELENGGARANYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS
YANG PRIMA DI BIDANG KEBUDAYAAN"**

MISI SETDITJEN KEBUDAYAAN

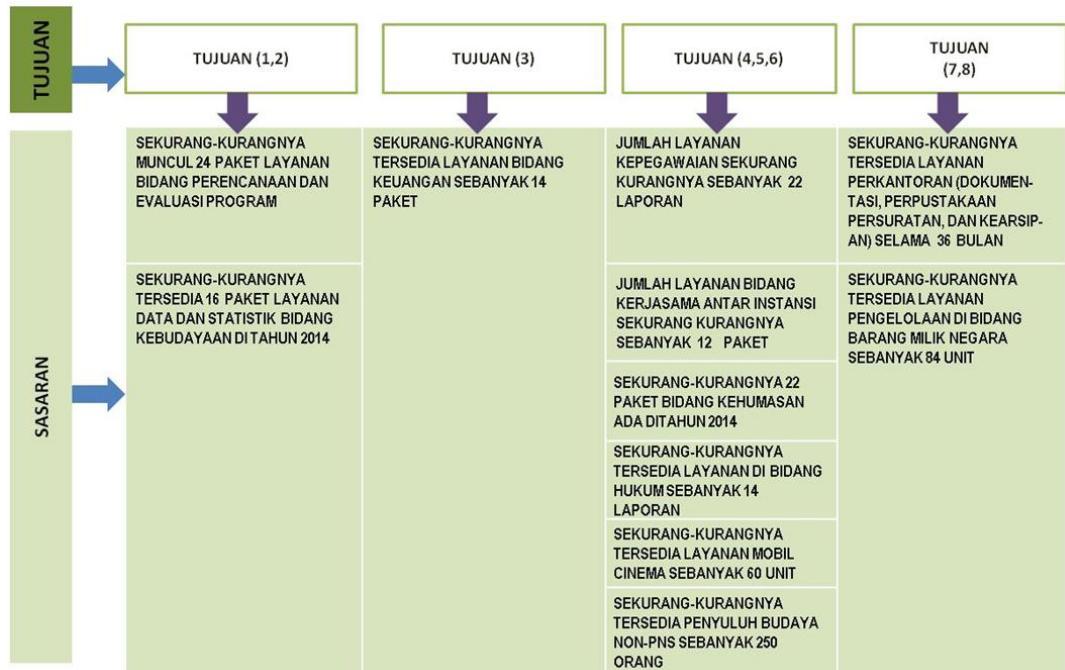
Berdasarkan Visi Setditjen Kebudayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, Misi Setditjen Kebudayaan diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|-----|---|
| M1. | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Program dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Kebudayaan. |
| M2. | Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Yang Efesien, Transparan Dan Akuntabel Dalam Mendukung Pelaksanaan Program |
| M3. | Membangun Payung Hukum Yang Kuat Dalam Memperkuat Kinerja Dan Sinergi Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Pelestarian Kebudayaan |
| M4. | Meningkatkan Tata Kelola Yang Prima Dalam Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Serta Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal. |

2. Tujuan dan Sasaran Strategis



Sasaran Strategis



3. Kebijakan dan Program Tahun 2013

Kebijakan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas dan kuantitas peraturan perundangan yang mengatur tentang pembangunan kebudayaan
2. Peningkatan layanan publik dan tata kelola organisasi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang kebudayaan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola
3. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia

Program dan Kegiatan Tahun 2013

Program dan Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013 adalah Program Pelestarian Budaya yang didukung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Organisasi.
- 2) Peningkatan kualitas SDM.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Bidang Kebudayaan dapat dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Bidang Hukum;
2. Layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program;
3. Layanan Bidang Keuangan;
4. Layanan Kepegawaian;
5. Layanan Bidang Kerjasama antar Instansi;
6. Layanan bidang kehumasan;
7. jumlah layanan perkantoran;
8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran;
9. Pelayanan data dan statistik kebudayaan.

B. Rencana Kinerja Tahun 2013

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bertujuan untuk peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Rencana Kinerja Tahun 2013 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL: RENCANA KINERJA TAHUN 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2013	Anggaran
1.	Meningkatnya Layanan Publik dan Tata Kelola	1. Jumlah Dokumen Layanan Bidang Hukum - Dokumen layanan bidang hukum	7	9.657.356.000
		2. Jumlah Dokumen Layanan Bidang Perencanaan dan Anggaran - Dokumen layanan bidang perencanaan dan anggaran	10	6.782.203.000

	3. Jumlah Dokumen Layanan Bidang Kepegawaian dan Organisasi - Dokumen layanan bidang kepegawaian dan organisasi	10	7.787.277.000
	4. Jumlah Dokumen Layanan Bidang Keuangan - Dokumen layanan bidang keuangan	6	3.175.712.000
	5. Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Instansi - Fasilitasi kerjasama antar instansi	4	11.500.000.000
	6. Jumlah Dokumen Layanan Kehumasan - Dokumen layanan kehumasan	9	12.707.423.000
	7. Jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS	150	10.500.000.000
	8. Jumlah Pengadaan Mobil Cinema dalam rangka Pembangunan Karakter Bangsa	40	45.000.000.000
	9. Jumlah Pelayanan Data dan Statistik Kebudayaan	6	43.000.000.000
	10. Layanan Perkantoran	12	13.699.724.000
	11. Kendaraan Bermotor	2	932.000.000
	12. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	17	100.000.000.
	13. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15	456.800.000
	14. Gedung/bangunan	11.682 m2	13.349.023.000
	JUMLAH		178.647.518.000

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai Rencana Kinerja Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas dilakukan kegiatan dan aktivitas yang dikuatkan dengan penetapan kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Rencana kinerja tersebut memuat sebanyak 14 output namun yang dikontrak-kinerjakan hanya 8 output dengan alokasi anggaran sebesar Rp 105.373.503.000,- dari total anggaran sebesar Rp 178.226,518.000,- yg tertuang dalam DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013

TABEL: Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Kebudayaan

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target 2013	Anggaran (dalam ribuan)
		Target Kinerja	
Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis bidang Kebudayaan	Jumlah dokumen layanan bidang Hukum - Dokumen bidang hukum	7	Rp 5.857.356,-
	Jumlah dokumen layanan bidang Perencanaan dan Evaluasi Program - Dokumen layanan bidang perencanaan dan evaluasi program	10	Rp 6.782.203,-
	Jumlah dokumen layanan bidang Keuangan - Dokumen layanan bidang keuangan	6	Rp 3.568.914,-
	Jumlah dokumen layanan bidang Kepegawaian - Dokume layanan	10	Rp 9.287.277,-

	bidang kepegawaian		
	Jumlah dokumen layanan bidang Kerjasama Antar Instansi - Dokumen layanan bidang kerjasama antar instansi	4	Rp 11.500.000
	Jumlah dokumen layanan bidang Kehumasan - Dokumen layanan bidang kehumasan	9	Rp12.721.753,-
	Jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS	150	Rp 12.656.000
	Jumlah pelayanan data dan statistik kebudayaan	6	Rp 43.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. ANALISIS PERMASALAHAN TAHUN 2012 DAN TINDAK LANJUT

Rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2012 sebanyak 7 target kinerja kegiatan dan dapat direalisasikan sebanyak 5 kinerja kegiatan, yaitu: jumlah dokumen layanan bidang keuangan, jumlah fasilitasi kerjasama antar instansi, jumlah dokumen layanan data dan statistik kebudayaan, jumlah dokumen layanan bidang kepegawaian dan organisasi, serta jumlah layanan perkantoran. Target kinerja kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya sebanyak 2 kinerja kegiatan, yaitu: jumlah dokumen layanan bidang perencanaan dan penganggaran, dan jumlah layanan kehumasan.

Target kinerja kegiatan, jumlah dokumen layanan perencanaan dan penganggaran, tidak tercapai karena tidak terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pamong Budaya, dan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. Ketidaktercapaian kinerja kegiatan tersebut disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Upaya mengatasi masalah tersebut telah dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dan telah dibangunnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan secara on-line.

Target kinerja kegiatan, jumlah dokumen layanan kehumasan, tidak dapat tercapai karena tidak terlaksananya kegiatan Siaran

Kebudayaan Melalui Media Elektronik. Ketidaktercapaian kinerja kegiatan tersebut dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan produksi dan pemilihan penyedia jasa pekerjaan Siaran Kebudayaan Melalui Media Elektronik.

Upaya mengatasi masalah tersebut telah dilakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan sejak dini dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah melalui sistem e-procurement pada Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. ANALISIS CAPAIAN SASARAN TAHUN 2013

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diukur/dilihat dari tingkatan ketercapaian Indikator Kinerja Utama Program Pelestarian Budaya, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
----------------------------	---

Sasaran strategis ini perealisasianya didukung oleh 8 indikator kegiatan dan 14 output dengan tingkat capaian sebagai berikut: Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator kinerja kegiatan: jumlah layanan bidang hukum, jumlah layanan bidang perencanaan dan evaluasi program, jumlah layanan bidang keuangan, jumlah layanan kepegawaian, jumlah layanan bidang kerjasama antar instansi, jumlah layanan

bidang kehumasan, jumlah penyuluhan budaya non PNS, dan jumlah pelayanan data dan statistik kebudayaan.

Capaian sasaran strategis tersebut sebagaimana diuraikan dalam matrik berikut.

Matrik 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
TAHUN 2013

NO	PROGRAM	SASARAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET DAN CAPAIAN			
				TARGET	CAPAIAN	% 2013	
				2013	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Program Pelestarian Budaya	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1	Jumlah Layanan Bidang Hukum - Dokumen Bidang Hukum	7 Dokumen	6 Dokumen	86
			2	Jumlah Layanan Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Program - Dokumen Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program	10 Dokumen	10 Dokumen	100
			3	Jumlah Layanan Bidang Keuangan - Dokumen Bidang Keuangan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
			4	Jumlah Layanan Kepegawaiuan - Dokumen Bidang Kepegawaiuan	10 Dokumen	10 Dokumen	100
			5	Jumlah Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi - Dokumen Bidang Kerjasama Antar Instansi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
			6	Jumlah Layanan Bidang Kehumasan	9 Dokumen	9 Dokumen	100
			7	Jumlah Penyuluhan Budaya non PNS	150 Penyuluhan	150 Penyuluhan	100
			9	Jumlah Pelayanan Data Dan Statistik Kebudayaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100

Berdasarkan Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dapat diuraikan target dan capaian masing-masing kinerja kegiatan sebagai berikut;

KINERJA KEGIATAN 1	LAYANAN BIDANG HUKUM
---------------------------	-----------------------------

Kinerja kegiatan layanan bidang hukum diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah dokumen layanan bidang hukum sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 2
MATRIX TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN LAYANAN BIDANG HUKUM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manjemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Bidang Hukum	0	0	0	7	6	86

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan Bidang Hukum"

Kinerja kegiatan jumlah layanan bidang hukum dengan target sebanyak 7 dokumen dapat tercapai 6 dokumen atau 86 %.

Target 7 layanan bidang hukum adalah :

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan
2. Penyusunan Permendikbud tentang Undang-undang Perfilman
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Museum
4. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perfilman
6. Penyusunan naskah dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan
7. Penyusunan SOP Protokoler dan Kearsipan

Dari target layanan bidang hukum dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen yaitu :

1. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan
2. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Museum
3. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
4. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film
5. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Perfilman
6. Draft Standar Operasional dan Prosedur Protokoler dan Kearsipan

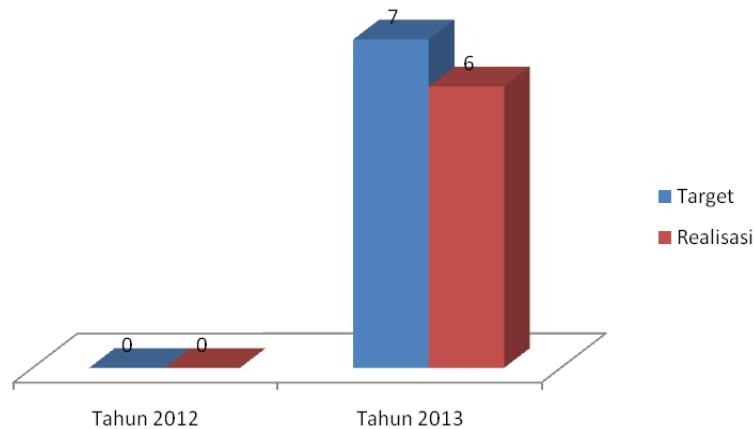
Target layanan bidang hukum, penyusunan Permendikbud tentang Undang-undang Perfilman tidak dapat dicapai karena belum selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film yang masih dalam pembahasan antar Kementerian.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut di tahun mendatang adalah melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film dengan mengintensifkan pelaksanaan koordinasi antar Kementerian.

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Hukum Tahun 2012 dan 2013.

Kinerja kegiatan layanan bidang hukum tidak ada target dan realisasinya pada tahun 2012, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 7 dokumen dan realisasi 6 dokumen, dapat digambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 1
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Hukum
Tahun 2012 dan 2013



KINERJA KEGIATAN 2	LAYANAN BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM
---------------------------	--

Kinerja kegiatan layanan bidang perencanaan dan evaluasi program, diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah dokumen layanan bidang perencanaan dan evaluasi program sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 3

MATRIK TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN LAYANAN BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manjemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Bidang Perencanaan dan evaluasi Program	4	3	75	10	10	100

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program"

Kinerja kegiatan jumlah layanan bidang Perencanaan dan Evaluasi Program dengan target sebanyak 10 dokumen dapat tercapai 10 dokumen atau 100 %.

Target 10 layanan bidang perencanaan dan evaluasi program, adalah :

1. Laporan dokumen perencanaan dan program sebanyak 4 dokumen
2. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan program dan anggaran pusat dan daerah sebanyak 1 laporan
3. Laporan tengah tahunan dan tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebanyak 2 laporan.
4. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan
5. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pamong Budaya

Dari target kinerja kegiatan layanan bidang perencanaan dan evaluasi program sebanyak 10 dokumen dapat terealisasi sebanyak 10 dokumen yaitu:

1. Dokumen rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan.
2. Dokumen Asistensi Penyusunan RKAKL.
3. Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Pusat dan Daerah
4. Dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
5. Dokumen Laporan Tengah Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan
6. Dokumen Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan
7. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan
8. Laporan Akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

9. Dokumen Laporan Evaluasi Prioritas Nasional
10. Dokumen Laporan Evaluasi Pamong Budaya.

Capaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan aktivitas sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Pusat dan Daerah Ditjen Kebudayaan tahun 2013.

Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Pusat dan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Planet Holiday Batam pada 13 – 15 Mei 2013 ini merupakan pertemuan yang sangat strategis sebagai upaya untuk memantapkan keterpaduan atau sinergisme seluruh stakeholder yang telah terjalin dengan baik dalam rangka memadukan kebijakan dan strategi program pembangunan Bidang kebudayaan yang berbasis kinerja.



Dukungan dan perhatian dari seluruh pihak di Bidang kebudayaan sangat menentukan keberhasilan dalam pengembangan program pelestarian budaya, sehingga nantinya memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kebudayaan.

Selain itu komitmen seluruh stakeholder sangat diharapkan untuk mendukung pola pikir dan bicara positif, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kebudayaan khususnya dalam melindungi dan melestarikan kekayaan

budaya. Aset-aset nasional di Bidang kebudayaan juga merupakan sumber daya budaya yang akan dikembangkan secara nasional untuk pemanfaatannya. Untuk mencapai keterpaduan program pelestarian budaya, maka perlu dilakukan rapat untuk membicarakan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dan anggaran tahun 2013 dan rencana Program/Kegiatan Tahun 2014.

Hasil rapat koordinasi penyusunan program dan anggaran pusat dan daerah bidang kebudayaan ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam rencana aksi 2013 serta rencana dan program 2014 untuk dapat direalisasikan bersama-sama.

2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013.

Tujuan dilaksanakannya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2013 adalah sebagai bahan masukan untuk mengetahui permasalah dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat disusun strategi untuk mengupayakan penanggulangannya, dan memantapkan persiapan pelaksanaan rencana dan program kegiatan tahun 2014.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan

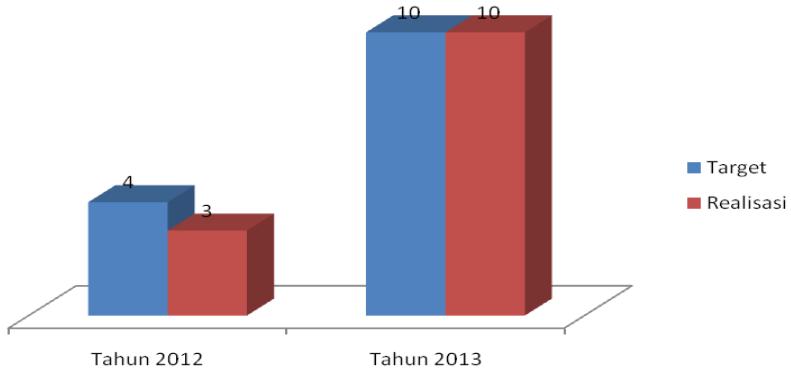


tahun 2013, yang diadakan di hotel Golden Boutique Melawai pada tanggal 19 s.d 21 Desember 2013 adalah Terwujudnya laporan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program Pelestarian Budaya. Serta memberikan gambaran dalam menangulangi hambatan dan masalah yang dihadapi selama satu tahun anggaran.

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program Tahun 2012 dan 2013.

Target dan realisasi kinerja kegiatan layanan bidang Perencanaan dan Evaluasi Program pada tahun 2012 dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 3 dokumen, apabila dibandingkan dengan target dan capaian kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 10 dokumen dan realisasi sebanyak 10 dokumen, dapat digambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program
Tahun 2012 dan 2013



KINERJA KEGIATAN 3	LAYANAN BIDANG KEUANGAN
---------------------------	--------------------------------

Kinerja kegiatan layanan bidang keuangan, diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah dokumen layanan bidang keuangan sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 4

MATRIX TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN LAYANAN BIDANG KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manjemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Bidang Keuangan	1	1	100	6	6	100

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan Bidang Keuangan"

Kinerja kegiatan jumlah layanan bidang keuangan dengan target sebanyak 6 dokumen dapat tercapai 6 dokumen atau 100%.

Target 6 dokumen layanan bidang Keuangan adalah :

1. Dokumen verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
2. Dokumen penyusunan POS pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
3. Dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
4. Dokumen evaluasi pengelolaan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksa
5. Dokumen penyusunan laporan keuangan

6. Dokumen penyusunan teknis pengujian pertanggungjawaban keuangan.

Dari target kinerja kegiatan layanan bidang keuangan sebanyak 6 dokumen dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen yaitu :

1. Laporan Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
2. Laporan Penyusunan POS Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
3. Laporan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
4. Laporan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksa
5. Laporan Keuangan Ditjen Kebudayaan
6. Laporan Penyusunan Teknis Pengujian Pertanggungjawaban Keuangan.

Capaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan aktivitas sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekertariat Direktorat Jenderal Kebudayaan



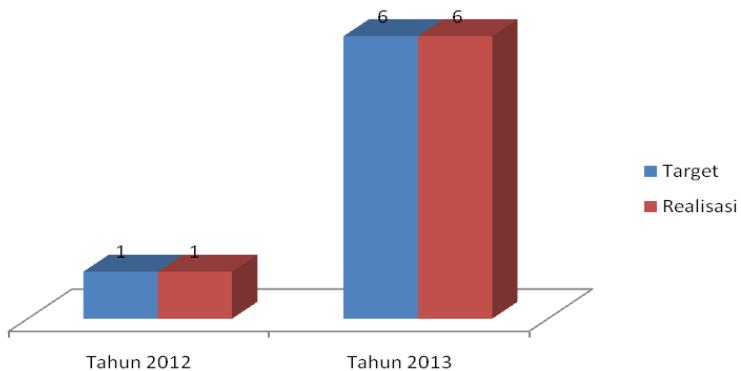
mempunyai salah satu fungsi pengelolaan keuangan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Aktifitas ini dilaksanakan dengan melakukan konsolidasi, verifikasi, dan analisa terhadap elemen laporan keuangan maupun antar elemen (laporan realisasi anggaran dan neraca). Melakukan analisa apakah laporan keuangan setiap satuan kerja telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan penuh sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Analisis Perbandingan Target dan Realisasai Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Keuangan Tahun 2012 dan 2013.

Target dan realisasi kinerja kegiatan layanan bidang keuangan tahun 2012 dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen, dapat digambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 3
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Keuangan Tahun 2012 dan 2013



KINERJA KEGIATAN 4	LAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN
---------------------------	-----------------------------------

Kinerja kegiatan layanan bidang kepegawaian, diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah dokumen layanan bidang kepegawaian sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 5

MATRIK TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN LAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manjemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Bidang Kepegawaian	2	2	100	10	10	100

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan Bidang Kepegawaian"

Kinerja kegiatan jumlah layanan bidang kepegawaian dengan target sebanyak 10 dokumen dapat tercapai 10 dokumen atau 100.%.

Target 10 dokumen layanan bidang Kepegawaian adalah :

1. Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
2. Bimtek Protokol dan Kehumasan
3. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
4. Bimtek Bendahara Pengeluaran
5. Bimtek Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi
6. Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai
7. Penilaian Jabatan Fungsional
8. Pemberian Bea siswa S2
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10. Laporan Dukungan Reformasi Birokrasi Kebudayaan

Dari target kinerja kegiatan layanan bidang keuangan sebanyak 10 dokumen dapat terealisasi sebanyak 10 dokumen yaitu :

1. Laporan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
2. Laporan Bimtek Protokol dan Kehumasan
3. Laporan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
4. Laporan Bimtek Bendahara Pengeluaran
5. Laporan Bimtek Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi
6. Laporan Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai
7. Laporan Penilaian Jabatan Fungsional
8. Laporan Pemberian Bea siswa S2
9. Laporan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
10. Laporan Dukungan Reformasi Birokrasi Kebudayaan

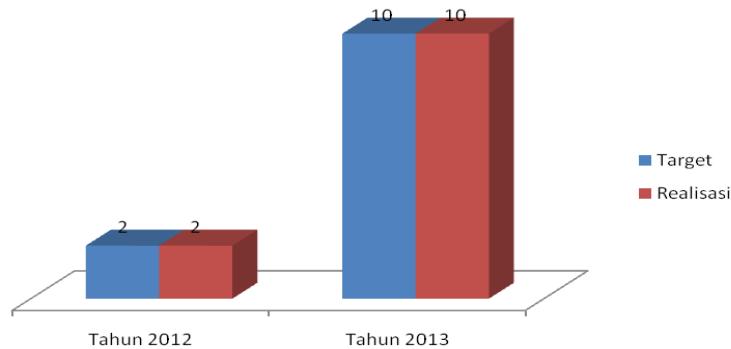
Capaian kinerja kegiatan tersebut antara lain:

1. Tersedianya admininstrasi pengelola data pegawai dan sumpah pegawai
2. Tersedianya tenaga MC dan kehumasan sebanyak 30 orang.
3. Tersedianya pengelola barang dan jasa yang professional dan bertanggung jawab sebanyak 25 orang.
4. Tersedianya tenaga pengelola keuangan yang bertanggung jawab sebanyak 20 orang.
5. Tersedianya tenaga perencana dan penganggaran yang berkualitas sebanyak 20 orang.
6. Terselesaikannya kasus yg berhubungan dengan disiplin dan pembinaan pegawai sebanyak 4 kasus, dan pembinaan pegawai diikuti sebanyak 200 orang.
7. Tersedianya data pegawai beserta nama jabatan fungsionalnya
8. Tersedianya tenaga museologi dan administrasi pengelola museum strata 2 sebanyak 26 pegawai.
9. Tersedianya tenaga penyidik pegawai negeri sipil di unit kerja teknis sebanyak 22 orang.
10. Terlaksananya sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan diikuti sebanyak 250 orang.

Analisis Perbandingan Target dan Realisasai Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Kepegawaian Tahun 2012 dan 2013

Target dan realisasi kinerja kegiatan layanan bidang kepegawaian tahun 2012 dengan target sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen, dapat digambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 4
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Kepegawaian Tahun 2012 dan 2013



KINERJA KEGIATAN 5	LAYANAN BIDANG KERJASAMA ANTAR INSTANSI
--------------------	---

Kinerja kegiatan layanan bidang kerjasama antar instansi, diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah dokumen layanan kerjasama antar instansi sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 6

MATRIX TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN LAYANAN BIDANG KERJASAMA ANTAR INSTANSI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi	2	2	100	4	4	100

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi"

Kinerja kegiatan jumlah layanan bidang kerjasama antar instansi dengan target sebanyak 4 dokumen dapat tercapai 4 dokumen atau 100 %.

Target 4 layanan bidang kerjasama antar instansi, adalah :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi
2. Kongres Kebudayaan Indonesia
3. Hubungan Bilateral
4. Penyelenggaraan Hari-hari Besar (HAPSAK)

Dari target kinerja kegiatan layanan bidang kerjasama antar instansi sebanyak 4 dokumen dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen yaitu :

1. Laporan Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi
2. Laporan Kongres Kebudayaan Indonesia
3. Laporan Hubungan Bilateral
4. Laporan Penyelenggaraan Hari-hari Besar (HAPSAK)

Capaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan aktivitas sebagai berikut:

1. Kongres Kebudayaan Indonesia



Kongres Kebudayaan Indonesia diadakan di Hotel Amabarukmo Yogyakarta pada tanggal 8 - 11 Oktober 2013. Kongres Kebudayaan Indonesia kali ini adalah kongres ke-16 dan merupakan

kelanjutan dari kongres-kongres kebudayaan sebelumnya yang telah dilakukan sejak tahun 1918. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan, Prof. Dr. Wiendu Nuryanti, dalam sambutan pembukaan berharap Kongres Kebudayaan Indonesia ini dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk pembangunan manusia dan budaya Indonesia ke depan.

Kongres kebudayaan Indonesia ini dibagi menjadi lima topik yaitu demokrasi berkebudayaan dan budaya berdemokrasi, warisan dan pewarisan budaya, diplomasi kebudayaan, pengelolaan kebudayaan, dan sumberdaya kebudayaan. Hasil atau rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2013 ini adalah :

- a. Menciptakan kehidupan demokrasi yang berwawasan budaya melalui pengungkapan kearifan lokal yang relevan.
- b. Pendidikan baik formal maupun non formal harus lebih mampu berperan dalam pewarisan kebudayaan Indonesia dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana.
- c. Menyusun grand design diplomasi kebudayaan yang dapat menciptakan keindonesiaan yang unggul dan kompeten
- d. Menciptakan system pengelolaan kebudayaan yang terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi serta menguatkan peran segenap pemangku kebudayaan.

- e. Menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan sumber daya kebudayaan untuk pembentukan keindonesiaan yang bermartabat dan mengembangkan sumberdaya kebudayaan secara berkelanjutan.

2. Penyelenggaraan Upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila

Upacara peringatan tahunan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan seluruh instansi pemerintahan serta BUMN. Pada kesempatan ini, Presiden RI didampingi oleh Ibu Negara yakni Ibu Ani Yudhoyono yang mengenakan kebaya abu-abu. Begitu pula Wakil Presiden RI, Bapak Boediono, yang didampingi Ibu Herawati Boediono. Selain itu, turut hadir jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, Pimpinan Lembaga Negara, Pejabat Kepolisian/TNI, Duta Besar negara-negara sahabat, dan Keluarga Pahlawan Revolusi.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2013 memiliki tema "Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa". Tujuan dari peringatan ini adalah agar bangsa Indonesia harus tetap berhati-hati terhadap adanya usaha-usaha baru untuk menggantikan Pancasila dengan cara yang sistematis baik terlihat dengan mata ataupun dalam tataran ide dan pemikiran yang abstrak. Bangsa Indonesia harus lebih giat dan tidak mengenal lelah dalam melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila lalu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

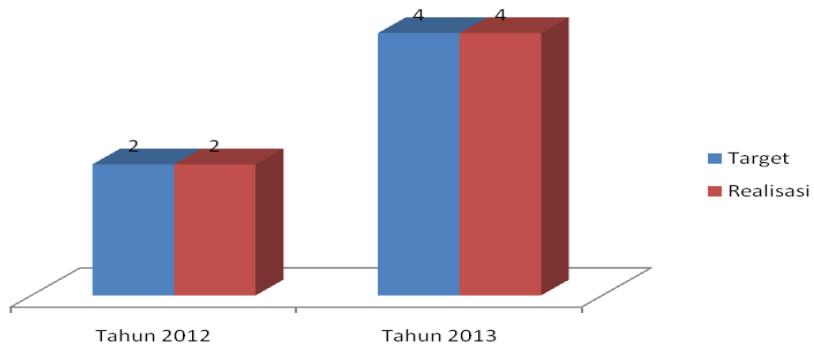
Pada upacara tahun ini, bertindak sebagai Perwira Upacara adalah Brigjen TNI Toto Rinanto, sedangkan Komandan Upacara adalah Kolonel Infrantri Eko Margiono. Pembaca naskah Pancasila adalah Ketua DPD RI, Bapak Irman Gusman. Kemudian pembaca naskah Pembukaan UUD 1945 adalah Ketua MPR RI, Bapak Sidarto Danusubroto. Sedangkan yang bertindak sebagai pembaca dan penandatangan Ikrar adalah Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Alie. Adapun pembaca doa penutup adalah Menteri Agama, Bapak Suryadharma Ali. Pembawa naskah-naskah tersebut merupakan tim Paskibraka DKI Jakarta.

Para peserta upacara terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, TNI dan POLRI yang terdiri dari Protokol TNI AD, AL, AU, dan POLRI (masing-masing 1 pleton); Taruna AKMIL, AAL, AAU, dan AKPOL (masing-masing 1 pleton); satu pleton terdiri dari Kowad, Kowal, Wara, dan Polwan; satu unit Korsik Mabes TNI dan POLRI. Kedua, Non-TNI dan POLRI yaitu satu kompi pelajar terdiri dari SD Negeri 11 Lubang Buaya, SMP Negeri 81, dan SMA Negeri 113; satu pleton Pramuka Kwartir DKI Jakarta (SMA Negeri 42); satu pleton Mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta; dan satu pleton organisasi kepemudaan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta.

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi Tahun 2012 dan 2013.

Target dan realisasi kinerja kegiatan layanan bidang kerjasama antar instansi pada tahun 2012 dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen, apabila dibandingkan dengan target dan capaian kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi sebanyak 4 dokumen, dapat digambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 5
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi Tahun 2012 dan 2013



KINERJA KEGIATAN 6	LAYANAN BIDANG KEHUMASAN
--------------------	--------------------------

Kinerja kegiatan Layanan Bidang Kehumasan, diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah dokumen layanan kehumasan sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 7

MATRIX TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN LAYANAN BIDANG KEHUMASAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Bidang Kehumasan	7	6	85	9	9	100

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan Bidang Kehumasan"

Kinerja kegiatan jumlah layanan bidang kehumasan dengan target sebanyak 9 dokumen dapat tercapai 9 dokumen atau 100 %.

Target 9 layanan bidang kehumasan, adalah :

1. Pencetakan Buku Bidang Kebudayaan
2. Penerbitan Buletin
3. Pendukungan Pameran Bidang Kebudayaan
4. Pengadaan Bahan Kepustakaan
5. Pariwara Bidang Kebudayaan di Media Massa
6. Peliputan, Press Tour, Kunjungan ke Media Jumpa Pers
7. Pengadaan Seni Kriya
8. Penerbitan Jurnal Direktorat Jenderal Kebudayaan

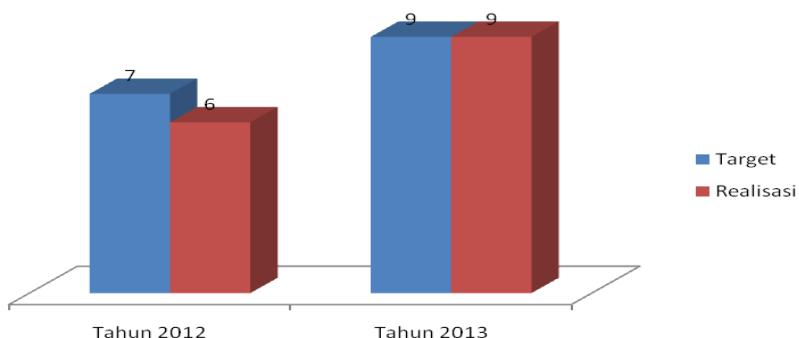
Dari target kinerja kegiatan layanan bidang kehumasan sebanyak 9 dokumen dapat terealisasi sebanyak 9 dokumen yaitu :

1. Pencetakan Buku Bidang Kebudayaan
 - Album Budaya Batik, sebanyak 1.000 eksemplar
 - Album Budaya Rumah Gadang, sebanyak 1.000 eksemplar
 - Bianglala Budaya, Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918 – 2013, sebanyak 1.000 eksemplar.
2. Penerbitan Buletin berupa Majalah Kebudayaan 2 kali terbitan sebanyak 2.000 eksemplar.
3. Pendukungan Pameran Bidang Kebudayaan
4. Pengadaan Bahan Kepustakaan
5. Pariwara Bidang Kebudayaan di Media Massa
6. Peliputan, Press Tour, Kunjungan ke Media Jumpa Pers
7. Pengadaan Seni Kriya
8. Penerbitan Jurnal Direktorat Jenderal Kebudayaan

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Kehumasan Tahun 2012 dan 2013

Target dan realisasi kinerja kegiatan jumlah layanan bidang kehumasan pada tahun 2012 dengan target sebanyak 7 dokumen dan realisasi 6 dokumen, apabila dibandingkan dengan target dan capaian kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 9 dokumen dan realisasi sebanyak 9 dokumen, dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 6
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Bidang Kehumasan Tahun 2012 dan 2013



KINERJA KEGIATAN 7	PENYULUH BUDAYA NON PNS
---------------------------	--------------------------------

Kinerja kegiatan Penyuluhan Budaya Non PNS, diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 8

MATRIK TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENYULUH BUDAYA NON PNS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manjemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS	100	100	100	150	150	100

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS"

Kinerja kegiatan jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS dengan target sebanyak 150 orang dapat tercapai 150 orang atau 100 %.

Target 150 orang penyuluhan budaya telah ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari target kinerja kegiatan Jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS sebanyak 150 orang penyuluhan budaya dapat terealisasi sebanyak 150 orang penyuluhan budaya yaitu :

- a. Aceh : 8 orang
- b. Medan : 8 orang
- c. Padang : 8 orang
- d. Jambi : 8 orang
- e. Babel : 7 orang

f. Tanjung Pinang	: 7 orang
g. Serang	: 8 orang
h. Bandung	: 7 orang
i. Bali	: 9 orang
j. Yogyakarta	: 15 orang
k. Kupang	: 8 orang
l. Pontianak	: 7 orang
m. Banjarmasin	: 7 orang
n. Samarinda	: 7 orang
o. Manado	: 7 orang
p. Makassar	: 10 orang
q. Ambon	: 7 orang
r. Ternate	: 7 orang
s. Papua	: 5 orang

Capaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan aktivitas sebagai berikut:

Perekrutan Dan Penempatan Penyuluhan Budaya.

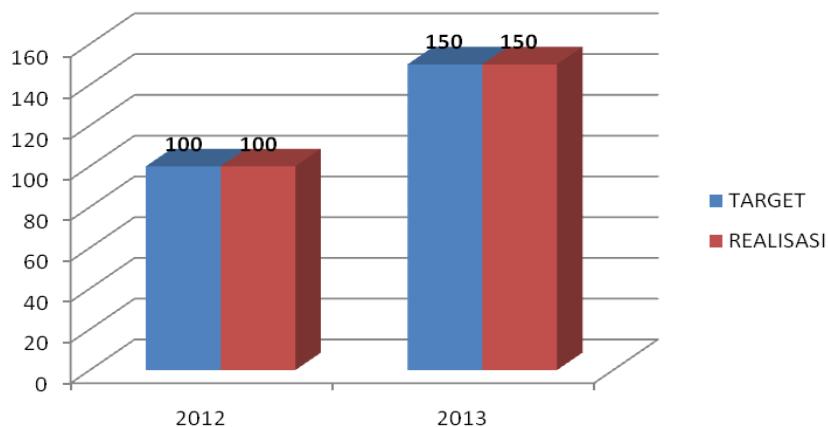
Tujuan khusus perekrutan penyuluhan budaya Non PNS antara lain :

- a. Membantu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas yang membidangi kebudayaan di 34 Propinsi dalam pembinaan dan pengembangan sejarah, nilai budaya, kesenian, perfilman, pelestarian cagar budaya, permuseuman, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, penelitian antropologis, pengkajian sastra dan filologi dan penelitian arkeologi.
- b. Memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada sarjana sejarah, antropologi, sosiologi, arkeologi, dan kesenian atau disiplin ilmu lain yang relevan tetapi berminat terhadap kebudayaan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil dalam memecahkan masalah kebudayaan, dan bertanggungjawab demi kemajuan bangsa.

Analisis Perbandingan Target dan Realisasai Kinerja Kegiatan Jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS Tahun 2012 dan 2013

Target dan realisasi kinerja kegiatan jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS pada tahun 2012 dengan target sebanyak 100 orang penyuluhan budaya dan realisasi 100 orang Penyuluhan Budaya, apabila dibandingkan dengan target dan capaian kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 150 orang Penyuluhan Budaya dan realisasi sebanyak 150 orang Penyuluhan Budaya, dapat digambar dalam grafik berikut ini.

Matriks 7
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Penyuluhan Budaya Non PNS Kebudayaan
Tahun 2012 dan 2013



KINERJA KEGIATAN 8	LAYANAN DATA DAN STATISTIK KEBUDAYAAN
---------------------------	--

Kinerja kegiatan layanan data dan statistik kebudayaan, diukur melalui target dan capaian kinerja jumlah dokumen layanan data dan statistik kebudayaan sebagaimana pada matrik berikut ini.

Matrik 9

MATRIX TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN LAYANAN DATA DAN STATISTIK KEBUDAYAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Data dan Statistik Kebudayaan	4	4	100	6	6	100

Berdasarkan matrik di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Layanan Data dan Statistik Kebudayaan"

Kinerja kegiatan jumlah layanan data dan statistik kebudayaan dengan target sebanyak 6 dokumen dapat tercapai 6 dokumen atau 100 %.

Target 6 dokumen layanan data dan statistik kebudayaan, adalah :

1. Pengelolaan Website Kebudayaan
2. Pengelolaan Data Kebudayaan
3. Statistik Kebudayaan
4. Publikasi dan Sosialisasi Indeks Kebudayaan
5. Penyusunan Ensiklopedi Kebudayaan
6. Infrastruktur

Dari target kinerja kegiatan layanan data dan statistik kebudayaan sebanyak 6 dokumen dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen yaitu :

1. Laporan Pengelolaan Website Kebudayaan
2. Laporan Pengelolaan Data Kebudayaan
3. Statistik Kebudayaan
4. Laporan Publikasi dan Sosialisasi Indeks Kebudayaan
5. Ensiklopedi Kebudayaan
6. Infrastruktur

Capaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan aktivitas sebagai berikut:

1. Website Kebudayaan

Dalam usaha melestarikan Kebudayaan di Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan membuat website yang berisi informasi Kebudayaan di Indonesia. Sebagaimana salah satu tugas dan fungsi Ditjen Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2011, adalah mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan cara membuka akses bagi publik berupa layanan informasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini membuat website dengan alamat <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>. Selain itu, informasi kebudayaan Indonesia juga disajikan secara ringan dan populer dalam laman/website yang dapat diakses di alamat www.kebudayaanindonesia.net.

Keberadaan warisan budaya Indonesia harus dimanfaatkan untuk kepentingan pelestarian dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sebagian dari warisan budaya Indonesia mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, terlebih lagi yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang mencerminkan

identitas bangsa dan merupakan bukti visual perjalanan atau

riwayat hidup umat manusia.

Dalam usaha mempublikasi, mensosialisasi, serta mengumpulkan opini, saran dan kritik

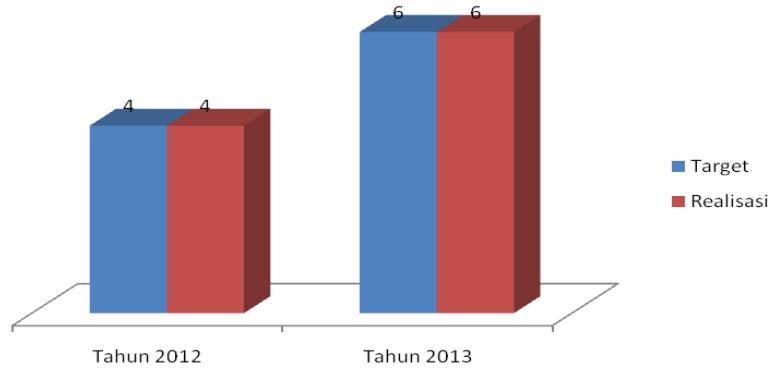


sebagai proses penyempurnaan website tersebut (konsep, isi, dan tampilan), Ditjen Kebudayaan membuat beberapa media sosial online serta menyelenggarakan berbagai kegiatan dan forum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan juga lingkungan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai penarik partisipasi seluruh stakeholder (pemerintah dan masyarakat) untuk sama-sama berkoordinasi mengelola dan mempublikasikan informasi kebudayaan yang ada di Indonesia.

Analisis Perbandingan Target dan Realisasai Kinerja Kegiatan Layanan Data dan Statistik Kebudayaan Tahun 2012 dan 2013

Target dan realisasi kinerja kegiatan jumlah layanan data dan statistik kebudayaan pada tahun 2012 dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen, apabila dibandingkan dengan target dan capaian kinerja kegiatan tahun 2013 dengan target sebanyak 6 dokumen dan realisasi sebanyak 6 dokumen, dapat digambar dalam grafik berikut ini.

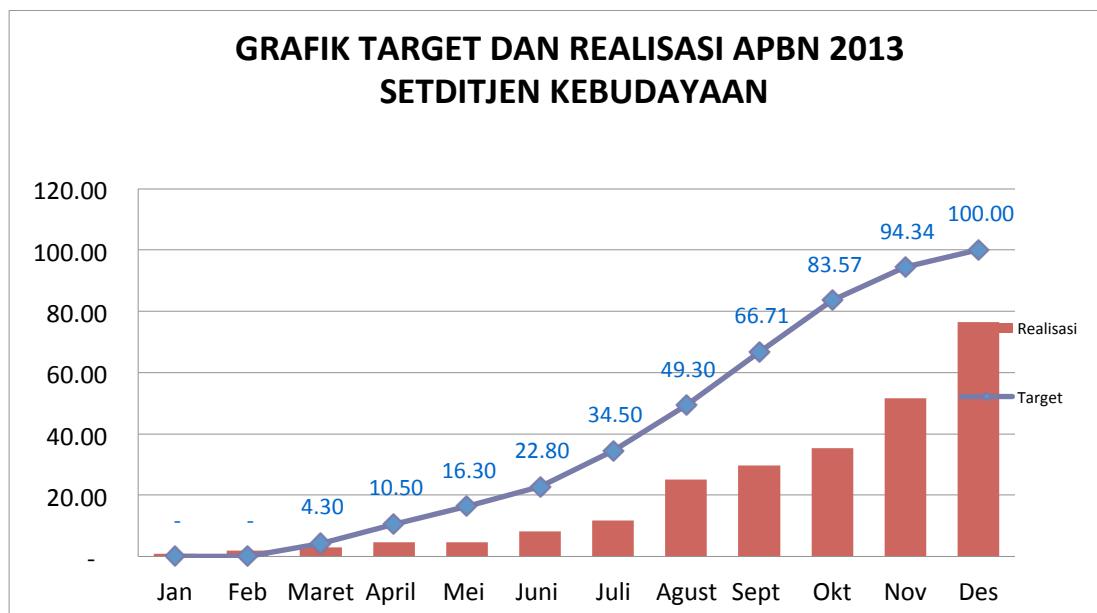
Grafik 8
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Kegiatan Layanan Data dan Statistik Kebudayaan Tahun 2012 dan 2013



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 178.226.518.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 136.205.842.928,- atau 76,42 %. Target dan realisasi anggaran tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 9



Realisasi anggaran per jenis belanja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013 sebagai berikut:

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Pegawai	4,752,663,000	4,598,225,035	96.75%	154,437,965	3.25%
2	Belanja Barang	90,934,035,000	62,605,230,476	68.85%	28,328,804,524	31.15%
3	Belanja Modal	82,539,820,000	69,002,387,417	83.60%	13,537,432,583	16.40%
	JUMLAH	178,226,518,000	136,205,842,928	76.42%	42,020,675,072	23.58%